

**PENDIDIKAN BAHASA KHUSUS DAN LITERASI SOSIAL SEBAGAI PILAR  
KEADILAN INKLUSIF MENUJU INDONESIA EMAS 2045****Mardi Panjaitan<sup>1</sup>**Universitas Negeri Padang  
mardipanjaitan@gmail.com**Yulian Dinihari<sup>2\*</sup>**Universitas Indraprasta PGRI  
yuliandini07@gmail.com  
yulian.dinihari@unindra.ac.id**Martua Ferry Siburian<sup>3</sup>**Universitas Indraprasta PGRI  
martua.ferrysiburian@unindra.ac.id**ABSTRAK**

Visi Indonesia emas 2045 menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, *pendidikan bahasa khusus* memegang peran strategis sebagai salah satu pilar keadilan inklusif di sektor pendidikan. Artikel ini bertujuan mengkaji peran pendidikan bahasa khusus dalam membentuk sistem pendidikan nasional yang responsif terhadap keberagaman dan kebutuhan peserta didik. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis kebijakan, artikel ini membahas berbagai tantangan serta strategi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Selain itu, artikel ini menyoroti urgensi penguatan *literasi sosial* sebagai bagian integral dari proses pembelajaran yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan yang inklusif, kapasitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, penguatan literasi sosial, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pendidikan bahasa khusus perlu ditempatkan sebagai pilar utama dalam membentuk generasi emas yang adil, inklusif, dan berdaya saing global.

Kata kunci: bahasa khusus, literasi sosial, inklusif

**A. PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia tengah memasuki fase penting dalam pembangunan bangsa melalui penetapan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan tercapainya status negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, dan berkeadaban. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif menjadi sangat krusial untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, memperoleh hak

pendidikan yang setara (Kemdikbud, 2020). Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut adalah melalui pendidikan bahasa khusus, yang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan berperan penting dalam menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang mengalami hambatan fisik, intelektual, emosional, atau sosial.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan, seperti Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak berkebutuhan khusus (Ali et al., 2020). Tantangan tersebut diperparah oleh minimnya infrastruktur pendukung, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus (Bappenas, 2022; Wahyudi & Latif, 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berorientasi pada kesamaan akses perlu ditingkatkan menjadi pendekatan yang lebih responsif terhadap keragaman kebutuhan.

Keadilan dalam pendidikan tidak hanya berarti memberikan akses yang sama, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. Pendidikan yang adil dan inklusif harus mampu mengakomodasi keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk berkembang secara optimal. Dalam hal ini, pendidikan khusus, termasuk pendidikan bahasa khusus, menjadi penguat sistem untuk menjembatani kesenjangan dan memastikan partisipasi aktif peserta didik berkebutuhan khusus dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Umiati, 2024).

Dalam ranah pendidikan bahasa, pendekatan inklusif harus memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang mengalami hambatan dalam penguasaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Pendidikan bahasa khusus dirancang secara eksplisit untuk menyesuaikan pembelajaran bahasa dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan bahasa khusus tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis berbahasa, tetapi juga berfungsi sebagai wahana strategis untuk menanamkan literasi sosial yang memperkuat keadilan dalam pendidikan inklusif.

Sayangnya, pendidikan bahasa khusus saat ini masih sering diposisikan sebagai komponen marjinal dalam sistem pendidikan nasional. Jika kondisi ini terus berlanjut,

akan sulit bagi Indonesia untuk mewujudkan visi besar tahun 2045. Oleh karena itu, pendidikan bahasa khusus perlu dimaknai sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Menjadikannya sebagai bagian dari strategi nasional bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum dan moral, melainkan sebagai investasi strategis untuk membangun masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan berkeadilan sosial (UNESCO, 2020; Hehir et al., 2016; Waitoller & Artiles, 2013).

Upaya mewujudkan pendidikan inklusif tidak cukup hanya dengan menyediakan akses dan institusi pendidikan. Diperlukan transformasi paradigma yang menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan yang bermakna. Salah satu pendekatan transformatif tersebut adalah melalui integrasi literasi sosial dalam kurikulum pendidikan khusus dan inklusif. Literasi sosial, sebagai bagian dari kompetensi abad ke-21, berperan penting dalam membentuk masyarakat demokratis dan kohesif (OECD, 2018). Dengan memperkuat dimensi ini, peserta didik tidak hanya disiapkan untuk mandiri secara akademik, tetapi juga untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan sosial yang plural dan berkeadaban (UNESCO, 2020).

Lebih dari sekadar layanan pembelajaran, pendidikan bahasa khusus dapat menjadi ruang strategis untuk membentuk literasi sosial peserta didik, yakni kemampuan memahami, menanggapi, dan berinteraksi secara konstruktif dalam masyarakat yang beragam (Gee, 2008). Dalam konteks pendidikan inklusif, literasi sosial juga mencakup kemampuan untuk hidup berdampingan, menghargai perbedaan, dan mengembangkan empati, baik bagi peserta didik reguler maupun yang berkebutuhan khusus.

Meskipun isu pendidikan inklusif dan penguatan literasi telah banyak dibahas, kajian yang secara spesifik mengaitkan pendidikan khusus dengan literasi sosial dalam kerangka keadilan inklusif menuju Indonesia Emas 2045 masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada literasi bahasa Indonesia di tingkat SMA (Fatmawati et al., 2024), pengembangan bahan ajar berbasis literasi budaya (Zain et al., 2023), serta literasi digital untuk mencegah perundungan (Fauzi et al., 2023; Dinihari et al., 2025). Sementara itu, dimensi literasi sosial yang menekankan pada empati dan penerimaan terhadap perbedaan masih jarang disentuh, terutama dalam konteks pendidikan khusus.

Urgensi pengkajian ini semakin tinggi mengingat masih rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya integrasi literasi sosial untuk mendukung kemandirian dan partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus di masyarakat. Pendidikan yang hanya menekankan capaian akademik tanpa mempertimbangkan aspek afektif dan sosial berisiko memperlebar jurang eksklusi. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan pendekatan konseptual yang memadukan pendidikan khusus dan literasi sosial sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan semangat keadilan sosial dan bertujuan menyiapkan generasi emas Indonesia yang adaptif, empatik, dan berdaya saing global.

Adapun tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis peran pendidikan khusus dalam penguatan literasi sosial sebagai bagian dari strategi pendidikan nasional inklusif. Artikel ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan khusus, serta menawarkan solusi melalui pendekatan literasi dan transformasi sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan analisis kebijakan, artikel ini berupaya menyajikan argumentasi komprehensif tentang pentingnya sinergi antara pendidikan khusus dan literasi sosial sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran pendidikan khusus dalam membentuk keadilan inklusif melalui penguatan literasi sosial di Indonesia. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan nasional, serta artikel ilmiah yang relevan. Fokus utama analisis adalah mengidentifikasi kebijakan, praktik, dan tantangan implementasi pendidikan khusus serta hubungannya dengan pencapaian literasi sosial di lingkungan pendidikan. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan data ke dalam kategori: (1) urgensi pendidikan khusus dalam kebijakan nasional, (2) bentuk literasi sosial dalam konteks pendidikan inklusif, dan (3) strategi sistemik untuk memperkuat keadilan inklusif melalui pendidikan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan tinjauan silang antar-literatur.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa *pendidikan khusus* memiliki kontribusi strategis dalam mendukung keadilan inklusif di Indonesia, terutama dalam menjamin hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus tidak hanya menyediakan akses terhadap pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana penting dalam penguatan nilai-nilai inklusi sosial yang menumbuhkan empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman sejak usia dini.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa *literasi sosial* merupakan komponen esensial yang perlu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan khusus. Dalam konteks ini, literasi sosial dipahami sebagai kemampuan peserta didik untuk memahami perbedaan, menjalin relasi sosial yang sehat, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, literasi sosial berperan sebagai modal sosial dan kultural yang memperkuat partisipasi setara peserta didik berkebutuhan khusus dalam ruang publik.

Analisis terhadap kebijakan, praktik pendidikan, dan literatur yang tersedia menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur yang ramah disabilitas, minimnya tenaga pendidik yang terlatih dalam pendekatan inklusif, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai literasi sosial dalam kurikulum nasional.

Namun demikian, penelitian ini juga mencatat adanya berbagai inisiatif positif dari lembaga pendidikan nonformal, komunitas orang tua, dan sejumlah daerah yang telah mulai mengimplementasikan praktik pendidikan inklusif berbasis literasi sosial. Inisiatif-inisiatif tersebut terbukti mampu meningkatkan partisipasi anak berkebutuhan khusus, menumbuhkan budaya inklusi di lingkungan sekolah, serta mengurangi diskriminasi dalam proses pendidikan.

Upaya memperkuat sinergi antara pendidikan khusus dan literasi sosial, serta menjadikannya sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional menuju *Indonesia Emas 2045*, terbuka peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan

berkeadaban. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan khusus bukan semata tanggung jawab moral, melainkan merupakan investasi strategis dalam membentuk sumber daya manusia unggul yang tidak meninggalkan satu pun warga negara di belakang.

Pendidikan khusus bukan sekadar layanan pelengkap, melainkan representasi nyata dari prinsip *nondiskriminasi* dan *kesetaraan* dalam sistem pendidikan. Layanan ini dapat diselenggarakan melalui sekolah luar biasa (SLB), satuan pendidikan inklusif, maupun dalam bentuk dukungan khusus di sekolah umum. Peserta didik yang dilayani mencakup anak-anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, motorik, emosi, autisme, gangguan belajar spesifik, serta kondisi medis tertentu yang memengaruhi proses pembelajaran.

Secara global, pendekatan terhadap pendidikan khusus telah mengalami pergeseran dari model segregatif menuju model inklusif yang menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di ruang kelas reguler dengan dukungan yang memadai. Paradigma ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional, seperti *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*.

Tujuan utama pendidikan khusus adalah memberikan kesempatan setara bagi peserta didik dengan disabilitas atau kebutuhan khusus lainnya untuk memperoleh pendidikan yang layak, bermakna, dan sesuai dengan potensi mereka. Pendidikan ini tidak hanya melayani peserta didik dengan hambatan, tetapi juga mereka yang memiliki keistimewaan atau potensi luar biasa yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang spesifik dan personal.

Di Indonesia, pendidikan khusus diselenggarakan melalui SLB yang melayani berbagai jenis disabilitas seperti tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, dan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan inklusi, terdapat upaya sistematis untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif di sekolah umum. Dalam model ini, peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama teman sebayanya dalam lingkungan sosial yang lebih luas, sehingga mendorong interaksi sosial yang sehat dan mengurangi stigma yang melekat.

Lebih lanjut, pendidikan khusus juga mencakup layanan pembelajaran yang fleksibel dan terindividualisasi, melalui pengajaran adaptif, pemanfaatan teknologi bantu, serta keterlibatan tenaga pendidik dengan kualifikasi khusus. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan akademik peserta didik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas partisipasi sosial, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat di masa depan.

Pendidikan khusus memiliki beberapa peran penting dalam mendukung terciptanya sistem pendidikan nasional yang adil dan inklusif, antara lain:

a. Memenuhi Hak Pendidikan Setiap Warga Negara

Pendidikan khusus menjamin hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang layak, setara, dan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional.

b. Mewujudkan Keadilan dan Inklusi Sosial

Dengan memberikan akses dan layanan pendidikan kepada semua anak tanpa diskriminasi, pendidikan khusus berkontribusi langsung terhadap pencapaian keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan dalam masyarakat.

c. Mendukung Pengembangan Potensi Individu secara Optimal

Setiap peserta didik memiliki potensi unik yang perlu dikembangkan. Pendidikan khusus membantu peserta didik berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian, kepercayaan diri, dan peran aktif dalam masyarakat.

d. Menjadi Komponen Penting dalam Pendidikan Inklusif

Pendidikan khusus memberikan fondasi penting bagi pelaksanaan pendidikan inklusif, di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama anak-anak lainnya dalam satu lingkungan yang mendukung keberagaman.

e. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Dengan memperhatikan kebutuhan semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, pendidikan nasional dapat menciptakan generasi yang lebih tangguh, terampil, dan mampu bersaing secara global menuju visi Indonesia Emas 2045.

f. Memperkuat Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan

Pendidikan khusus merupakan instrumen penting dalam menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi fisik maupun mentalnya, memperoleh kesempatan belajar yang bermartabat. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip inklusivitas dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan.

g. Meningkatkan Partisipasi Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Melalui pendidikan khusus, pemerintah mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan umum. Hal ini berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan.

h. Menumbuhkan Budaya Toleransi dan Empati Sejak Dini

Pendidikan yang mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan sejak usia dini. Ini sangat penting dalam membangun masyarakat inklusif dan harmonis.

i. Mendorong Inovasi dalam Pembelajaran dan Kurikulum

Pendidikan khusus menuntut pendekatan yang kreatif dan adaptif. Hal ini mendorong pengembangan strategi pembelajaran, kurikulum diferensiasi, serta penggunaan teknologi bantu yang juga dapat diterapkan secara luas dalam pendidikan umum.

j. Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional yang Berkeadilan

Pendidikan khusus memiliki kontribusi jangka panjang dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif meskipun memiliki keterbatasan. Ini selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapa pun (*no one left behind*), sebagaimana tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas.

### **Kondisi Aktual Pendidikan Khusus**

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, sistem pendidikan telah mengakui pentingnya pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang adil dan merata. Namun, implementasi pendidikan khusus dan inklusif di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi

tantangan yang kompleks baik secara struktural, teknis, maupun sosial (Faradhiva, 2025). Ada beberapa kondisi aktual pendidikan khusus dan pendidikan inklusif yaitu:

a. Pendidikan Khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi lembaga utama dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. SLB dibedakan berdasarkan jenis hambatan yang dialami peserta didik, antara lain SLB-A untuk tunanetra, SLB-B untuk tunarungu, SLB-C untuk tunagrahita, SLB-D untuk tuna daksa, SLB-E untuk tuna laras, dan SLB-G untuk anak dengan hambatan ganda.

Meski telah memberikan kontribusi besar, jumlah SLB masih terbatas dibandingkan dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyak anak belum mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan.

b. Pendidikan Inklusif di Sekolah Reguler

Sejak diterbitkannya Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, pemerintah Indonesia telah mendorong sekolah-sekolah reguler untuk menerima dan melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif mengedepankan prinsip belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama tanpa diskriminasi, dengan dukungan yang sesuai terhadap perbedaan dan kebutuhan peserta didik (Arifin, 2024).

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif masih belum optimal. Banyak sekolah belum memiliki guru yang terlatih dalam pendidikan khusus, belum tersedia sarana prasarana yang ramah disabilitas, dan belum ada kurikulum yang benar-benar fleksibel dan adaptif. Bahkan, masih terdapat penolakan secara halus dari beberapa sekolah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus karena dianggap “menggangu” jalannya proses belajar mengajar

c. Dukungan Kebijakan Belum Merata

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mendukung hak pendidikan untuk semua, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut

sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Beberapa daerah seperti Yogyakarta, Jawa Barat, dan Bali telah menunjukkan kemajuan dalam pendidikan inklusif, sementara daerah lain masih mengalami ketertinggalan.

d. Peran Guru dan Tenaga Kependidikan

Salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Pelatihan bagi guru inklusif masih bersifat sporadis dan tidak merata di seluruh wilayah. Banyak guru di sekolah reguler belum memahami pendekatan pembelajaran yang tepat untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, sehingga layanan pendidikan menjadi kurang efektif (Wahyudi & Latif, 2023).

e. Tantangan Sosial dan Budaya

Selain persoalan teknis dan struktural, stigma dan diskriminasi sosial terhadap anak berkebutuhan khusus masih menjadi hambatan besar. Banyak masyarakat, bahkan tenaga pendidik, yang belum memahami pentingnya pendidikan inklusif dan masih memandang peserta didik dengan kebutuhan khusus sebagai beban atau penghambat proses belajar. Kurangnya edukasi dan kampanye publik juga memperlambat penerimaan sosial terhadap pendidikan inklusif.

f. Peran Lembaga Nonformal dan Komunitas

Dalam kondisi terbatasnya fasilitas pendidikan khusus dari pemerintah, berbagai lembaga swadaya masyarakat, yayasan, serta komunitas orang tua turut berperan aktif dalam memberikan pendidikan alternatif atau pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus. Meskipun cakupannya masih terbatas, kehadiran mereka sangat penting dalam mendorong praktik inklusif di tengah masyarakat.

g. Menuju Sistem yang Lebih Inklusif

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan, sistem pendidikan nasional harus mengintegrasikan prinsip inklusi secara menyeluruh, mulai dari kebijakan, kurikulum, pembelajaran, hingga evaluasi. Pemerintah perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) pengembangan pendidikan khusus dan inklusif, meningkatkan pelatihan guru, memperluas fasilitas pendukung, dan memperkuat sinergi antara sekolah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

### **Tantangan Pendidikan Khusus**

Ada beberapa tantangan di Pendidikan khusus Sebagai Pilar Keadilan Inklusif Menuju Indonesia Emas 2045, yaitu :

a. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur

Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki fasilitas fisik yang ramah disabilitas seperti jalur landai, toilet khusus, atau ruang kelas yang mudah diakses. Keterbatasan ini membuat anak berkebutuhan khusus kesulitan masuk dan berpartisipasi dalam lingkungan pendidikan reguler (Sapitri, 2025).

b. Kurangnya Tenaga Pendidik yang Kompeten

Mayoritas guru di sekolah umum belum mendapat pelatihan khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman pedagogis dan strategi pembelajaran yang inklusif serta minimnya diferensiasi pembelajaran di kelas (Ferdianto, 2024).

c. Minimnya Alat Bantu dan Teknologi Pendidikan

Alat bantu belajar seperti hearing aid, braille printer, atau software pembelajaran khusus masih jarang tersedia di sekolah. Teknologi adaptif pun belum banyak digunakan, padahal sangat penting untuk menunjang proses belajar anak-anak dengan kebutuhan khusus.

d. Stigma Sosial dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masih banyak masyarakat, termasuk orang tua siswa lain, yang memandang anak berkebutuhan khusus secara negatif. Mereka dianggap sebagai beban atau tidak layak untuk belajar bersama di sekolah reguler. Stigma ini menjadi penghalang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif (Bappenas, 2021).

e. Ketimpangan Implementasi Pendidikan Inklusif antar Daerah

Beberapa kota/kabupaten memiliki program pendidikan inklusif yang maju karena dukungan pemerintah daerah, sementara yang lain masih sangat tertinggal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan implementasi karena belum adanya standar nasional yang benar-benar dipatuhi oleh semua daerah.

f. Kebijakan yang Belum Terimplementasi Efektif

Meski banyak regulasi telah dikeluarkan seperti Permendikbud No. 70 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 2016, pelaksanaannya di lapangan masih belum

maksimal. Evaluasi, pendampingan, dan sanksi atas ketidakpatuhan masih sangat lemah.

g. Sistem Kurikulum yang Kurang Fleksibel

Kurikulum nasional cenderung seragam dan kurang memperhatikan kebutuhan individual anak. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan kurikulum yang adaptif, fleksibel, dan berbasis kemampuan.

h. Pendataan Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Akurat

Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum teridentifikasi atau tidak terdaftar dalam sistem pendidikan. Hal ini membuat mereka tidak mendapatkan haknya secara penuh, dan pemerintah pun kesulitan dalam perencanaan program.

i. Minimnya Anggaran Khusus

Pendanaan untuk pendidikan inklusif masih sangat terbatas dan sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam anggaran pendidikan, terutama di daerah. Akibatnya, program penguatan SDM, pelatihan guru, serta penyediaan alat bantu belajar tidak berjalan optimal.

### **Peran Pendidikan Khusus**

Pendidikan bahasa khusus berfokus pada pengajaran bahasa kepada peserta didik yang memiliki hambatan komunikasi, bahasa, atau kognitif. Strategi pembelajarannya mencakup pendekatan multimodal, penggunaan teknologi bantu bahasa, serta integrasi nilai-nilai sosial dalam materi ajar. Pembelajaran bahasa menjadi jembatan dalam membangun kemampuan peserta didik untuk memahami dunia sekitarnya, mengekspresikan diri, serta menjalin relasi sosial yang sehat. Guru memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kekhususan peserta didik.

Selain memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pendidikan khusus juga berkontribusi signifikan dalam pengembangan literasi sosial dan kultural. Literasi dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada kemampuan membaca dan menulis secara teknis, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap keberagaman sosial, pengakuan atas hak asasi individu, serta kemampuan untuk berinteraksi secara inklusif dalam masyarakat yang heterogen (Gee, 2008; UNESCO, 2020). Pendidikan khusus memberikan ruang bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengembangkan literasi fungsional dan kritis yang relevan dengan konteks

kehidupan nyata mereka, termasuk kemampuan untuk menyuarakan kebutuhan dan haknya (Hehir et al., 2016).

Dalam kerangka literasi sosial, pendidikan bahasa khusus berfungsi membentuk kemampuan komunikasi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga etis dan empatik. Literasi sosial dalam pembelajaran bahasa membantu peserta didik berkebutuhan khusus untuk memahami norma-norma sosial, menyampaikan ide dengan menghargai perbedaan, serta merespon secara konstruktif terhadap keragaman. Dengan demikian, pendidikan bahasa khusus tidak hanya melatih keterampilan linguistik, tetapi juga mengasah dimensi sosial dan afektif peserta didik.

Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan, pendidikan khusus tidak hanya memenuhi hak dasar anak, tetapi juga berperan sebagai sarana penting dalam membentuk literasi sosial yang memungkinkan peserta didik menjadi individu reflektif, mandiri, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara setara (Waitoller & Artiles, 2013). Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif dan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan partisipasi aktif setiap warga sebagai bagian dari masyarakat adil dan demokratis.

#### **D. SIMPULAN**

Pendidikan khusus dan literasi sosial terbukti memiliki peran yang sangat penting sebagai pilar keadilan inklusif dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis pada studi literatur dan analisis kebijakan, tulisan ini mengungkap bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang bersifat normatif, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi pendidik, dan dukungan budaya masyarakat yang inklusif. Secara khusus, pendidikan bahasa khusus merupakan wahana potensial dalam membangun literasi sosial peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pembelajaran bahasa yang inklusif, adaptif, dan kontekstual, peserta didik dapat berkembang sebagai individu yang komunikatif, empatik, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan bahasa khusus harus menjadi prioritas dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang adil dan inklusif.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Sudaryono, S., Musa, A. M., Luknanto, D., Alfian, M. A., Amirrachman, A., & Rahmawati, Y. (2020). *Arah Kompetensi Generasi Indonesia Menuju 2045*. Jakarta: Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP).
- Arifin, A. A., Jariah, N., Arfa, U., & Puspita, R. (2024). *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga dan Sekolah Menuju Generasi Emas 2045*. Penerbit Adab.
- Dinihari, Y., Rafli, Z., & Boeriswati, E. (2024). *Inovasi Bahan Ajar Literasi: Pendekatan Gamifikasi dan Pedagogi Modern*. EDUPEDIA Publisher.
- Dinihari, Y., Solihatun, S., Wiyanti, E., & Nazelliana, D. (2025). Penguatan Literasi Digital Guru untuk Pencegahan Perundungan di Pondok Pesantren. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 8(1).
- Fakhrul, M. N., Abdurahim, M., Afriansyah, A., & Ubaidah, U. (2023). Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 3(1), 26-34.
- Faradhiva, B. P., Sangra, G., Saputri, R. Y., & Lestari, E. P. (2025). Memahami Esensi Pendidikan Inklusif: Menciptakan Lingkungan Belajar Setara dan Berkeadilan untuk Semua Peserta Didik. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, 786–789.
- Fatmawati, F., Haryati, G., Rustan, N. A., & Istiqomah, A. (2024). Profil Kemampuan Literasi Bahasa Indonesia Siswa Kelas XII SMA Muhammadiyah Maumere. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 13(1).
- Fauzi, A., Solihat, I., Fauziah, M. T., & Muldawati, M. (2023). Pembiasaan Literasi Digital sebagai Strategi Peningkatan Kompetensi Digital pada Mahasiswa Peserta PLP FKIP UNTIRTA. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 12(3), 67–78.
- Ferdianto, M. (2024). Problematika pendidikan di Indonesia dalam Gelora Membangun Generasi Emas 2045. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(1), 9–14.
- Gee, J. P. (2008). *Social linguistics and literacies: Ideology in discourses* (3rd ed.). Routledge.
- Hehir, T., Grindal, T., Freeman, B., Lamoreau, R., Borquaye, Y., & Burke, S. (2016). *A Summary of the Evidence on Inclusive Education*. Abt Associates.
- Hehir, T., Schifter, L. A., Grindal, T., Ng, M., & Eidelman, H. (2016). *A summary of the evidence on inclusive education*. Alana Institute. Retrieved from [https://alana.org.br/wpcontent/uploads/2016/12/A\\_Summary\\_of\\_the\\_evidence\\_on\\_inclusive\\_education.pdf](https://alana.org.br/wpcontent/uploads/2016/12/A_Summary_of_the_evidence_on_inclusive_education.pdf)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2022). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045*.

- Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Nurfadhillah, S. (2023). *Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus)*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- OECD. (2018). *The Future of Education and Skills: Education 2030 – The Future we Want*. OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org/education/2030/>
- Sapitri, A. (2025). Manajemen Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Jurnal Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 12-18.
- Sidik, F., Rofi'i, A., & Diana, D. (2025). Implementasi Kurikulum Adaptif untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 133-143.
- Solihatun, S., Dinihari, Y., Wiyanti, E., Nazelliana, D., & Musringudin, M. (2025). Profil Literasi Siswa dalam Upaya Mereduksi Perundungan di Pondok Pesantren Aliyah Al-Fadlillah. *Nitisara: Jurnal Ilmu Bahasa*, 3(1).
- Umiati, U., & Sufi, I. S. (2024). Implementasi Pendidikan Berbasis Multikultural: Membentuk Karakter Siswa Menuju Indonesia Emas 2045. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 53-67.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and Education – All Means All*. UNESCO Publishing. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>
- Wahyudi, F., & Latif, A. (2023). Pendidikan Inklusif di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Dissability Studies and Research (JDSR)*, 2(2), 86-103.
- Waitoller, F. R., & Artiles, A. J. (2013). A decade of professional development research for inclusive education: A critical review and notes for a research program. *Review of Educational Research*, 83(3), 319–356. <https://doi.org/10.3102/0034654313483905>
- Zain, M. Y., Rafli, Z., & Setiadi, S. (2023). Analisis kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar Teori dan Apresiasi Sastra bagi Mahasiswa PGSD Berlandaskan Literasi Budaya. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 12(1), 67–81.